



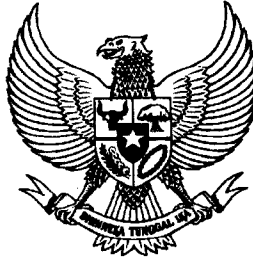
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG

Rencana Kerja

Tahun 2026

2026





BUPATI BELITUNG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 22A TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6951);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

17. Peraturan...

17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

25. Peraturan...

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 95);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 82);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 96);
30. Peraturan Bupati Belitung Nomor 70 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 71);

31. Peraturan...

31. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 14);

32. Peraturan Bupati Belitung Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Bupati adalah Bupati Belitung.
3. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Belitung yang dipimpin oleh Camat.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

1. sebagai pedoman dan acuan dalam rangka implementasi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026; dan

2. sebagai...

2. sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu; dan
3. rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026.

BAB III

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN.
- b. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA.
- c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.
- d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.
- e. BAB V PENUTUP.

BAB IV...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 5 Agustus 2025
BUPATI BELITUNG,

ttd.

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 5 Agustus 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MARZUKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2025 NOMOR 22A

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


WIGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H., M.Si.
NIP. 19720607 200003 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena dengan karunia-Nya maka Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung telah menyusun dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2026 ini disusun sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung pada tahun anggaran 2026 yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi serta menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja. Diharapkan dokumen Rencana Kerja ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di tahun anggaran 2026 sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam rangka mewujudkan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.

Semoga Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung dapat memberikan manfaat bagi pelaksana program, kegiatan dan sub kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih banyak kekurangan, maka masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung sehingga terwujud Peningkatan pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik.

Tanjungpandan, Agustus 2025

Pi. Sekretaris Daerah,

The image shows a circular official stamp of the Belitung Regency Secretariat. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG" at the top and "SEKRETARIAT DAERAH" at the bottom. In the center of the stamp is a smaller emblem featuring a shield with a sun, a gear, and a book, with the motto "BERSAMA SAMA MELAKSANAKAN TRANSFORMASI" written below it. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "Marzuki" is printed in a simple font.

DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
 Bab 1 Pendahuluan.....	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
 Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu	 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	 8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	18
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	 23
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
 Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	 39
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	39
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	40
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	41
 Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	 46
 Bab 5 Penutup	 48
 Lampiran	

DAFTAR TABEL

	<i>hal</i>
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung	9
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung	22
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran Indikator dan Target Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2026.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Sekretariat Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2026.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2026 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung pada Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 Pemerintah Kabupaten Belitung.

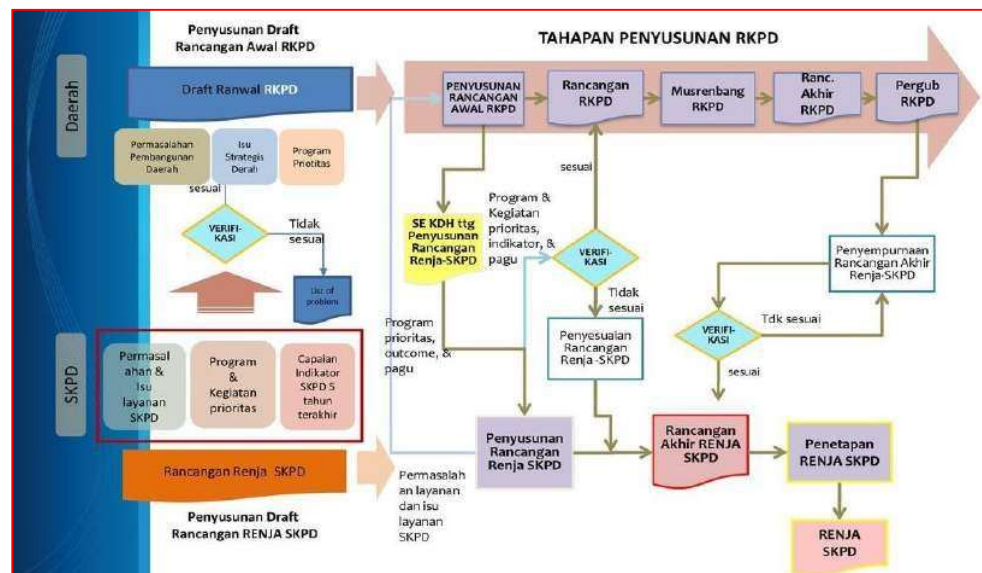
Program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif dalam Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dokumen Renja ini menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berikut gambaran keterkaitan antara Renstra, Renja, RKPD dan Proses penyusunan APBD.

Tahapan proses penyusunan dan sistematika Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana dan target capaian program dan kegiatan selama 5 (lima) tahunan dijabarkan kembali kedalam rencana kerja untuk masa

kerja 1 (satu) tahunan dengan memperhatikan dinamika yang berkembang serta permasalahan yang ada di lingkungan Birokrasi dan Masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung menyusun Rencana Kerja 1 (satu) tahunan untuk tahun 2025 berdasarkan pedoman dan aturan yang berlaku.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju. Tahapan penyusunan Renja dapat dilihat pada gambar berikut ini :

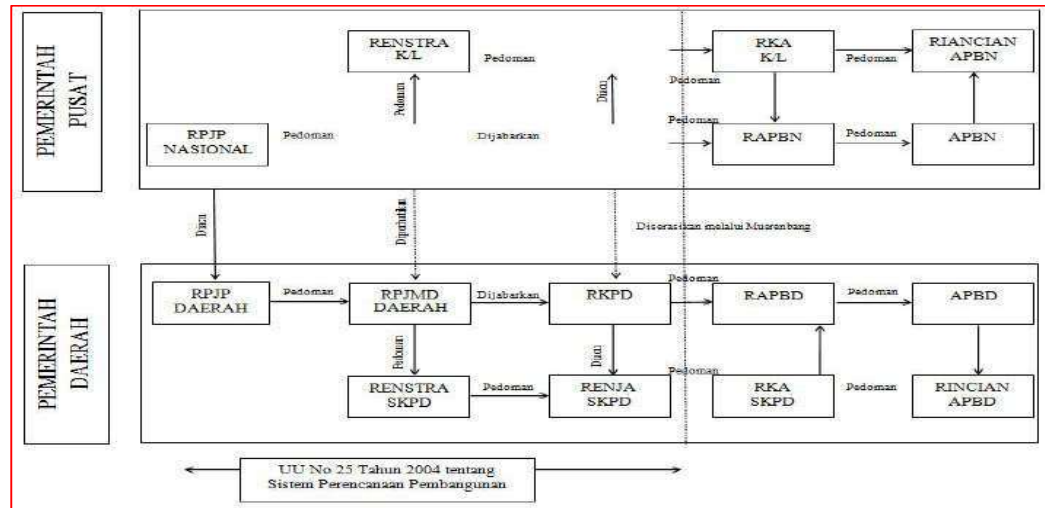


Gambar 1.1 Tahapan penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah

menjadi pedoman dalam menyusun dokumen Renja Kerja Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.2 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Awal Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2026, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6951);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor Perangkat 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6633);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 95);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 96);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung tahun 2026 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung nomor 55);
23. Peraturan Darah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 99);
24. Peraturan Bupati Belitung Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung;

1.3 Maksud dan Tujuan

- Maksud dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 ini adalah sebagai pedoman dan arah bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode satu tahun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Belitung dan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah.
- Tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung ini adalah agar tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung tahun 2026 dapat dicapai.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2026, disajikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah meliputi seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 dan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi capaian kinerja 2024 dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU Sekretariat daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 dan berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Ahkr Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
					6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Semua Bidang																									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Penentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (persen)	0,00		100,00		100										0,00%								Sekretariat Daerah	
			Penentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (persen)	0,00		100,00		100										0,00%									
			Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah (persen)	0,00	-	73,59	104.535.965.723	70	42.259.067.499	6.179.550.735	8.837.013.295	8.891.795.789	13.827.460.267	-	37.735.820.086	0,00%	89,30%		142.271.785.809	0,00%							
			Penentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah (persen)	0,00		100,00		100										0,00%									
			Penentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah (Persen)	0,00		100,00		100										0,00%									
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan ()	-	0,00	156.117.260	10	68.401.505	4	13.899.400	1	1.560.000	3	6.738.500	1	39.106.100	9	61.304.000	90,00%	89,62%	0,00	217.421.260	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	3,00	53.489.410	3	16.208.000	1	6.138.500	1	-	-	2.027.000	-	7.504.000	2	15.669.500	66,67%	96,68%	5,00	69.158.910	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	-	1,00	17.757.700	1	9.972.300	-	-	-	-	1	-	-	8.659.000	1	8.659.000	100,00%	86,83%	2,00	26.416.700	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	-	1,00	15.183.400	1	8.772.300	-	-	-	-	1	-	-	8.217.900	1	8.217.900	100,00%	93,68%	2,00	23.401.300	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	-	1,00	19.855.350	1	8.736.000	1	2.615.400	-	-	-	4.711.500	-	1.050.000	1	8.376.900	100,00%	95,89%	2,00	28.232.250	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	-	1,00	15.574.650	1	8.301.000	-	-	-	-	1	-	-	8.032.700	1	8.032.700	100,00%	96,77%	2,00	23.607.350	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang direvaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang direvaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024/Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)	SKPD Penanggungjawab	Keterangan							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	3,00	34.256.750	3	16.411.905	2	5.145.500	-	1.560.000	-	-	1	5.642.500	3	12.348.000	100,00%	75,24%	6,00	46.604.750	0,00%	0,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ukuran keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	2,00	51.483.666.787	2	21.323.198.102	1	4.641.940.294	-	5.762.374.387	1	4.179.145.683	-	4.733.953.459	2	19.317.413.823	100,00%	90,59%	2,00	70.801.080.610	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	110,00	51.320.774.332	116	21.140.734.827	106	4.623.893.898	106	5.638.207.039	106	4.165.233.443	110	4.711.615.559	110	19.138.949.939	94,83%	90,53%	220,00	70.459.724.271	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-	2,00	162.892.455	2	182.463.275	1	18.046.396	-	124.167.348	1	13.912.240	-	22.337.900	2	178.463.884	100,00%	97,81%	4,00	341.356.339	0,00%	0,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhi nya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (Orang)	-	16,00	421.886.871	20	361.000.000	3	15.786.386	3	30.905.683	3	126.230.231	7	52.601.465	16	225.523.765	80,00%	62,47%	16,00	647.410.636	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	-	1,00	154.690.000	1	108.000.000	-	-	1	-	-	103.155.000	-	-	1	103.155.000	100,00%	95,51%	2,00	257.845.000	0,00%	0,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	16,00	267.196.871	20	253.000.000	3	15.786.386	3	30.905.683	3	23.075.231	7	52.601.465	16	122.368.765	80,00%	48,37%	32,00	389.565.636	0,00%	0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhi nya administrasi umum Perangkat Daerah (Persen)	-	100,00	10.061.676.940	100	4.194.250.068	25	369.552.360	25	655.238.743	25	804.641.492	25	1.452.243.023	100	3.281.675.618	100,00%	78,24%	100,00	13.343.352.558	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	1,00	584.136.750	1	200.000.000	-	-	-	49.662.000	1	49.817.500	-	99.372.500	1	198.852.000	100,00%	99,43%	2,00	782.988.750	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	1,00	545.026.340	2	261.324.560	-	12.050.100	-	20.140.700	2	40.100.000	-	153.309.000	2	226.407.800	100,00%	86,64%	3,00	771.434.140	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	1,00	530.535.500	1	260.000.000	-	-	-	61.072.000	-	62.779.500	1	132.873.500	1	256.725.000	100,00%	98,74%	2,00	787.260.500	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	2,00	4.530.255.540	2	1.783.545.400	-	112.459.290	-	242.520.057	2	329.863.800	-	525.643.287	2	1.210.486.434	100,00%	67,87%	4,00	5.740.741.974	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	1,00	128.098.050	1	46.980.100	-	-	-	3.184.700	1	3.285.600	-	16.424.200	1	22.894.500	100,00%	48,73%	2,00	150.992.550	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	-	1,00	345.060.000	1	125.000.000	-	8.000.000	-	18.000.000	-	38.120.000	1	60.560.000	1	124.680.000	100,00%	99,74%	2,00	469.740.000	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	12,00	3.349.664.760	12	1.500.000.000	3	236.242.970	3	260.659.286	3	277.517.092	3	457.760.536	12	1.232.179.884	100,00%	82,15%	24,00	4.581.844.644	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (P-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (P-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahunan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024/akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		SiPD Penanggungjawab	Keterangan		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	-	1,00	48.900.000	1	17.400.000	-	-	-	-	-	3.150.000	1	6.300.000	1	9.450.000	100,00%	54,31%	2,00	58.350.000	0,00%	0,00%				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jenis barang milik daerah (Jenis)	-	6,00	5.818.100.400	6	3.676.470.000	-	-	2	328.300.000	2	803.390.000	2	2.173.720.000	6	3.305.410.000	100,00%	89,91%	6,00	9.123.510.400	0,00%	0,00%				
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	8,00	2.584.000.000	15	1.982.000.000	-	-	10	328.300.000	-	-	3	1.396.500.000	13	1.724.800.000	86,67%	87,02%	21,00	4.308.800.000	0,00%	0,00%				
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	90,00	205.700.000	100	199.920.000	-	-	3	-	-	-	97	194.175.000	100	194.175.000	100,00%	97,13%	190,00	399.875.000	0,00%	0,00%				
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	119,00	2.069.943.000	55	900.500.000	-	-	-	-	-	572.970.000	55	239.475.000	55	812.445.000	100,00%	90,22%	174,00	2.882.388.000	0,00%	0,00%				
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	2,00	958.457.400	300	594.050.000	-	-	-	-	-	230.420.000	300	343.570.000	300	573.990.000	100,00%	96,62%	302,00	1.532.447.400	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi pemerintahan (Persen)	-	100,00	6.371.010.532	100	2.525.066.000	25	461.747.567	25	519.404.275	25	636.217.412	25	715.876.432	100	2.333.245.686	100,00%	92,40%	100,00	8.704.256.218	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	12,00	73.061.590	12	12.720.000	3	1.162.180	3	1.183.090	3	2.197.880	3	3.956.960	12	8.500.110	100,00%	66,82%	24,00	81.561.700	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	12,00	3.127.272.997	12	1.384.000.000	3	291.678.187	3	264.860.385	3	365.745.649	3	324.521.267	12	1.246.805.488	100,00%	90,09%	24,00	4.374.078.485	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	12,00	3.170.675.945	12	1.128.346.000	3	168.907.200	3	253.360.800	3	268.273.883	3	387.368.205	12	1.077.940.088	100,00%	95,53%	24,00	4.248.616.033	0,00%	0,00%				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah dalam kondisi baik (Jenis)	-	28,00	12.811.020.517	8	3.670.817.000	5	249.635.600	-	557.120.764	3	638.430.883	-	1.875.283.715	8	3.320.470.962	100,00%	90,46%	28,00	16.131.491.479	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan obayakan Pajaknya	*Jumlah Kendaraan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan obayakan Pajaknya (Unit)	-	4,00	70.513.000	4	30.000.000	4	-	4	-	4	20.962.650	4	-	4	20.962.650	100,00%	69,88%	8,00	91.475.650	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan obayakan Pajak dan Pembiayannya (Unit)	-	155,00	2.046.107.211	154	898.225.000	13	123.006.100	13	98.556.250	59	173.267.800	69	406.822.700	154	801.652.850	100,00%	89,25%	309,00	2.850.760.061	0,00%	0,00%				
		Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	0,00	-	10	120.000.000	-	-	4	38.625.000	4	40.950.000	2	39.610.000	10	119.185.000	100,00%	99,32%	10,00	119.185.000	0,00%	0,00%				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	200,00	1.294.000.078	200	765.000.000	50	71.185.000	50	101.930.000	50	132.020.000	50	441.841.500	200	746.976.500	100,00%	97,64%	400,00	2.040.976.578	0,00%	0,00%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ kegiatan output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sdt Tahun 2024/akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra sdt tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan			
					5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi (Unit)				18,00	9.397.400.228		5	1.857.592.000	-	55.444.500	-	318.009.514	5	271.230.433	5	987.009.515	5	1.631.693.962	100,00%	87,84%	23,00	11.029.094.190	0,00%	0,00%		
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah (Persen)		-	100,00	3.843.137.573		100	1.324.843.674	25	161.642.400	25	294.466.911	25	268.359.948	25	493.622.330	100	1.218.091.589	100,00%	91,94%	100,00	5.061.229.162	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menemuka Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)		-	2,00	888.232.332	1	515.343.674	1	11.642.400	1	105.466.911	1	77.859.948	1	249.726.688	1	444.695.947	100,00%	86,29%	3,00	1.332.928.279	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Pakelan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Paket Pakelan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)		-	1,00	390.000.000	1	159.500.000	1	-	-	39.000.000	-	40.500.000	-	80.000.000	1	159.500.000	100,00%	100,00%	2,00	549.500.000	0,00%	0,00%				
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)		-	5,00	114.165.277	4	50.000.000	-	-	-	-	-	-	1	13.895.642	1	13.895.642	25,00%	27,79%	6,00	128.060.919	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menemuka Dana Penunjang Operasional kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)		-	17,00	2.450.739.964	17	600.000.000	17	150.000.000	17	150.000.000	17	150.000.000	17	150.000.000	17	600.000.000	100,00%	100,00%	34,00	3.050.739.964	0,00%	0,00%				
		Fasilitasi Kerumah Tanggahan Sekeluar Daerah	kebutuhan kerumah Tanggahan sekeluar daerah (Paket)		-	11,00	4.240.902.295	11	1.216.360.200	-	77.246.700	-	351.175.050	11	167.275.820	-	443.725.710	11	1.039.423.280	100,00%	85,45%	11,00	5.280.325.575	0,00%	0,00%				
		Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	*Jumlah Paket kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)		-	5,00	2.440.642.030	12	1.116.825.600	-	60.657.600	-	326.291.400	12	142.352.170	-	421.606.910	12	950.948.080	100,00%	85,15%	17,00	3.391.590.110	0,00%	0,00%				
		Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Paket kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)		-	5,00	1.358.591.065	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	5,00	1.358.591.065	0,00%	0,00%					
		Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga Sekeluar Daerah	*Jumlah Paket kebutuhan Rumah Tangga Sekeluar Daerah yang Disediakan (Paket)		-	2,00	441.669.200	4	99.534.800	-	16.589.100	-	24.883.650	4	24.883.650	-	22.118.800	4	88.475.200	100,00%	88,89%	6,00	530.144.400	0,00%	0,00%				
		Pemetaan Organisasi	Dokumen pemetaan organisasi (Dokumen)		-	7,00	648.394.923	7	335.656.550	-	46.310.482	-	22.446.296	2	77.834.948	5	112.652.180	7	259.243.906	100,00%	77,23%	7,00	907.638.829	0,00%	0,00%				
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)		-	2,00	277.067.923	2	113.850.000	-	32.110.482	-	17.241.296	-	27.955.215	2	26.400.000	2	103.706.993	100,00%	91,09%	4,00	380.774.916	0,00%	0,00%				
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)		-	2,00	114.218.750	2	80.672.800	-	800.000	-	2.985.000	-	7.205.000	2	34.400.000	2	45.390.000	100,00%	56,26%	4,00	159.608.750	0,00%	0,00%				
		Peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi	*Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)		-	1,00	96.607.250	1	47.361.250	-	3.600.000	-	-	1	1.800.000	-	31.156.936	1	36.556.936	100,00%	77,19%	2,00	133.164.186	0,00%	0,00%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024/Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)	SVPD Penanggungjawab	Keterangan						
							I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16	17										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
SEKRETARIAT DAERAH																										
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah yang Dindaklanjuti (Persen)	0,00	0,00	100									-	0,00%									Sekretariat Daerah	
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang Dindaklanjuti (Persen)	0,00	-	0,00	45.653.604.162	100	18.147.603.100	7.451.039.966	4.811.756.311	2.702.001.637	1.684.344.516	16.649.142.430	0,00%	91,74%	62.302.746.592	0,00%								
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Perundang-Undangan, Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Informasi yang Dindaklanjuti (Persen)	0,00	0,00	100									-	0,00%										
		Administrasi Tata Pemerintahan	Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan (Dokumen)	-	8,00	2.533.998.752	6	1.023.753.550	-	408.883.257	-	105.711.807	4	144.673.956	2	301.652.700	6	960.921.720	100,00%	93,86%	8,00	3.494.920.472	0,00%	0,00%		
		Penataan Administrasi Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	-	2,00	1.087.967.774	1	683.691.050	-	360.514.585	-	63.083.760	-	101.619.428	1	121.230.320	1	646.448.093	100,00%	94,56%	3,00	1.734.415.867	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	-	1,00	141.557.572	1	105.163.500	-	5.274.825	-	26.354.228	-	13.047.748	1	38.967.230	1	83.634.029	100,00%	79,53%	2,00	225.191.601	0,00%	0,00%		
		Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	-	5,00	1.304.473.406	4	234.899.000	-	43.093.847	-	16.273.821	3	30.006.780	1	141.465.150	4	230.839.558	100,00%	98,27%	9,00	1.535.313.004	0,00%	0,00%		
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Dokumen Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Dokumen)	-	9,00	42.315.040.695	5	16.129.361.450	-	6.963.807.431	-	4.588.284.382	-	2.383.801.120	5	898.307.511	5	14.834.200.444	100,00%	91,97%	9,00	57.149.241.139	0,00%	0,00%		
		Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	*Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	-	4,00	23.932.554.499	2	6.550.760.000	-	272.898.932	-	3.678.862.932	-	1.475.399.766	2	117.278.980	2	5.544.440.610	100,00%	84,64%	6,00	29.476.995.109	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tercapaian								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024/aktor Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan			
					I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17			
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang / Jasa yang Ditindaklanjuti (Persen)	0,00		0,00		100									-		0,00%								Sekretariat Daerah		
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Penyusunan, Pengendalian Program Pembangunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan yang Ditindaklanjuti (Persen)	0,00		0,00		100									-		0,00%			71,65%			10.424.705.876		0,00%		
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang Ditindaklanjuti (Persen)	0,00		0,00		100									-		0,00%										
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Laporan Pelaksanaan kebijakan Perekonomian (Dokumen)	-	11,00	231.816.076		11	280.840.600	2	45.494.300	1	25.114.518	4	35.579.856	4	68.744.502	11	174.933.176	100,00%	62,20%	11,00	406.749.252	0,00%	0,00%				
		Koordinasi, Sinkronisasi, Montoring dan Evaluasi kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	*Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, Sinkronisasi, Montoring dan Evaluasi kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	-	4,00	75.468.113		2	164.037.400	-	36.797.700	-	11.455.900	1	11.749.380	1	31.916.332	2	91.919.292	100,00%	56,04%	6,00	167.387.405	0,00%	0,00%				
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	-	7,00	156.347.963		7	87.839.900	2	8.195.100	-	7.788.778	3	14.429.916	2	27.323.370	7	57.737.164	100,00%	65,73%	14,00	214.085.127	0,00%	0,00%				
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	*Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil (Dokumen)	-	0,00	-		2	28.963.300	-	501.500	1	5.869.840	-	9.400.580	1	9.504.800	2	25.276.720	100,00%	87,27%	2,00	25.276.720	0,00%	0,00%				
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Dokumen Administrasi Pembangunan (Dokumen)	-	13,00	2.142.852.515		14	776.603.239	3	21.026.180	3	63.453.731	3	171.226.785	5	206.502.805	14	464.209.501	100,00%	59,77%	13,00	2.607.062.016	0,00%	0,00%				
		Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan	*Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	-	0,00	-		1	74.872.300	-	10.002.216	-	8.266.647	-	20.473.125	1	24.239.470	1	62.981.458	100,00%	84,12%	1,00	62.981.458	0,00%	0,00%				
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	-	1,00	1.812.209.506		1	567.542.484	-	1.200.000	-	4.180.000	-	129.321.600	1	142.868.456	1	277.570.055	100,00%	48,91%	2,00	2.089.779.961	0,00%	0,00%				

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 67 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung bahwa Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah, dan pelayanan administrasi perangkat daerah. Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah;
dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Sedangkan Susunan Organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

1. **Sekretaris Daerah**

2. **Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

- a) Bagian Pemerintahan
- b) Bagian Kesejahteraan Rakyat
- c) Bagian Hukum

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, hukum dan kesejahteraan rakyat;

- b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
- f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi :

- a) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- b) Bagian Administrasi Pembangunan
- c) Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang/jasa. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa;
- c. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang/jasa;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa;

- e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Asisten Administrasi Umum

Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi :

- a) Bagian Umum
- b) Bagian Organisasi
- c) Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Bidang Administrasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
- f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah ;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan..

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13
1	Persentase capaian tujuan dan sasaran daerah Bidang Administrasi Umum	-	-	66,66%	80%	100%	75%	-	100%	
2	Persentase capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	100%	100%	100%	102,14%	-	100%	
3	Persentase capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	-	-	100%	100%	100%	101,98%	-	100%	

2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung selaku perangkat daerah yang memberikan supporting system kepada Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran sebagai koordinator seluruh perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah, menyelenggarakan administrasi pemerintahan, penatalaksanaan organisasi, serta memberikan fasilitasi administrasi kepada seluruh perangkat daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah harus mampu mengukur kinerja pelayanan yang sudah dilaksanakan, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan, serta mengetahui tantangan atau peluang yang dimiliki dan memformulasikan isu-isu penting yang merupakan rekomendasi untuk bisa diterapkan dalam program dan kegiatan akan dilaksanakan. Dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah,

1. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi OPD

Pengertian masalah atau hambatan adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan, dengan kata lain merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Permasalahan atau hambatan yang terdapat di Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat diklasifikasi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan otonomi daerah belum optimal;
2. Sistem, prosedur dan mekanisme kerja birokrasi belum terlaksana secara efisien dan efektif;
3. Sistem perencanaan, penganggaran dan sistem akuntabilitas kinerja belum terintegrasi secara optimal;
4. Kompetensi sumber daya aparatur yang masih rendah dan distribusi sumber daya aparatur yang belum merata.

2. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan OPD

Pengertian peluang dapat diartikan sebagai kesempatan, kemungkinan untuk menang (mencapai tujuan) untuk mendapatkan keuntungan, atau juga dapat diartikan dengan kesempatan waktu yang luang. Sedangkan pengertian dari tantangan yaitu perlawanan sesuatu yang berat, yang banyak dikerjakan untuk sesuatu yang menarik, yang menimbulkan semangat/motivasi untuk melakukan atau mencapai tujuan.

Tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu dari dalam (internal) dan luar (eksternal) organisasi yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tersedianya Sumber Daya Aparatur dari berbagai macam disiplin ilmu;
2. Anggaran pendukung pencapaian tugas dan fungsi Sekretariat;
3. Perkembangan informasi dan teknologi yang makin pesat dalam mendukung pengelolaan data dan informasi;
4. Kondisi masyarakat yang kondusif di wilayah Kabupaten Belitung;
5. Kondisi Geografis Kabupaten Belitung yang strategis dan potensial.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Perubahan RKPD tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung. Proses perencanaan dan Musrenbang yang dilakukan dengan membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat diterima dan akan digunakan secara efektif untuk melaksanakan kegiatan dalam 1 tahun anggaran untuk mencapai target secara optimal. Tujuan dari proses RKPD dan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari adanya anggaran yang berlebih serta optimalisasi kegiatan yang dilaksanakan, serta

untuk mengevaluasi kewajaran terhadap anggaran dengan indikator dari kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD				
	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Urusan : Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Bidang Urusan : Sekretariat Daerah					Urusan : Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Bidang Urusan : Sekretariat Daerah				
1	1 Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tanjung pandan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100%	5.902.900,00	1 Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tanjung pandan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	5.902.900,00
			Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Sesuai Ketentuan	100%	21.292.866.241,55			Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Sesuai Ketentuan	100%	21.292.866.241,55
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	80,15%	105.000.000,00			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	80,15%	105.000.000,00
			Survey Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	85 (Baik)	5.847.509.260,00			Survey Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	85 (Baik)	5.847.509.260,00
			Survey Kepuasan Pelayanan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah	85 (Baik)	986.431.000,00			Survey Kepuasan Pelayanan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah	85 (Baik)	986.431.000,00
			Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	100%	2.830.723.794,00			Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	100%	2.830.723.794,00
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Bagian Organisasi yang Dievaluasi dan Ditindaklanjuti	100%	178.463.000,00			Persentase Rekomendasi Kebijakan Bagian Organisasi yang Dievaluasi dan Ditindaklanjuti	100%	178.463.000,00
			Persentase Pelaksanaan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	100%	982.691.000,00			Persentase Pelaksanaan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	100%	982.691.000,00

No	Rancangan Awal RKPD						Rancangan Awal RKPD					
	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanjung pandan	Hasil : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dok	5.902.900,00		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanjung pandan	Hasil : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dok	5.902.900,00	
	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2.087.600,00		Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2.087.600,00	
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	250.000,00		2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	250.000,00	
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	250.000,00		3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	250.000,00	
	4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1.223.400,00		4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1.223.400,00	
	5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	763.400,00		5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	763.400,00	
	6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Lap	1.328.500,00		6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Lap	1.328.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD						Rancangan Awal RKPD					
	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Kegiatan :	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tanjung pandan	Hasil : Jumlah Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Peraturan	2 Dok	21.292.866.241,55	Kegiatan :	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tanjung pandan	Hasil : Jumlah Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Peraturan	2 Dok	21.292.866.241,55
	Sub Kegiatan :	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	113 Orang/Bulan	21.291.605.841,55	Sub Kegiatan :	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	113 Orang/Bulan	21.291.605.841,55
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Lap	1.260.400,00		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Lap	1.260.400,00
	Kegiatan :	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tanjung pandan	Hasil : Jumlah Penerima Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20 Org	105.000.000,00	Kegiatan :	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tanjung pandan	Hasil : Jumlah Penerima Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20 Org	105.000.000,00
	Sub Kegiatan :	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Pegawai Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Org	105.000.000,00		1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Org	105.000.000,00
	Kegiatan :	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tanjung pandan	Hasil : Jumlah Paket Penyediaan Keperluan Administrasi Umum Perangkat Daerah	20 Paket	2.521.644.260,00	Kegiatan :	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tanjung pandan	Hasil : Jumlah Paket Penyediaan Keperluan Administrasi Umum Perangkat Daerah	20 Paket	2.521.644.260,00
	Sub Kegiatan :	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	Sub Kegiatan :	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00

No	Rancangan Awal RKPD						Rancangan Awal RKPD					
	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	203.630.456,00		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	203.630.456,00	
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	43.025.000,00		3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	43.025.000,00	
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.031.754.000,00		4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.031.754.000,00	
	5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30.656.000,00		5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30.656.000,00	
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dok	100.040.400,00		6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dok	100.040.400,00	
	7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	1.012.538.404,00		7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	1.012.538.404,00	
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tanjung pandan	Hasil : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13 Laporan	3.325.865.000,00		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tanjung pandan	Hasil : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13 Laporan	3.325.865.000,00	
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan jasa Surat Menyurat	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Lap	8.600.000,00		Sub Kegiatan : 1. Penyediaan jasa Surat Menyurat	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	8.600.000,00	
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Lap	1.509.000.000,00		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1.509.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD						Rancangan Awal RKPD					
	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	20.000.000,00		3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	20.000.000,00	
	4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Lap	1.788.265.000,00		4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	1.788.265.000,00	
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tanjung pandan	Hasil : Jumlah Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	136 Unit	986.431.000,00		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tanjung pandan	Hasil : Jumlah Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	136 Unit	986.431.000,00	
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	49.670.000,00		Sub Kegiatan : Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	49.670.000,00	
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	68 Unit	436.761.000,00		2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	68 Unit	436.761.000,00	
	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	250.000.000,00		3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	250.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD						Rancangan Awal RKPD					
	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit	250.000.000,00		4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit	250.000.000,00
	Kegiatan :	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tanjung pandan	Hasil : Jumlah Penerima Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	1.750.773.794,00	Kegiatan :	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tanjung pandan	Hasil : Jumlah Penerima Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	1.750.773.794,00
	Sub Kegiatan :	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 org/bln	928.413.794,00	Sub Kegiatan :	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 org/bln	928.413.794,00
		2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Paket Pakaian dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	145.360.000,00		2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Paket Pakaian dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	145.360.000,00
		3. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 Orang	77.000.000,00		3. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 Orang	77.000.000,00
		4. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	17 Org/Bln	600.000.000,00		4. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	17 Org/Bln	600.000.000,00
	Kegiatan :	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tanjung pandan	Hasil : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Terpenuhi	12 Paket	1.079.950.000,00	Kegiatan :	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tanjung pandan	Hasil : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Terpenuhi	12 Paket	1.079.950.000,00

No	Rancangan Awal RKPD						Rancangan Awal RKPD							
	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Sub Kegiatan :	1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tanjung pandan	Keluaran :	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	530.525.000,00	Sub Kegiatan :	1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tanjung pandan	Keluaran :	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disdiakan	5 Paket	530.525.000,00
		2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tanjung pandan	Keluaran :	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	529.425.000,00		2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tanjung pandan	Keluaran :	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disdiakan	5 Paket	529.425.000,00
		3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tanjung pandan	Keluaran :	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	2 Paket	20.000.000,00		3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tanjung pandan	Keluaran :	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	2 Paket	20.000.000,00
	Kegiatan :	Penataan Organisasi	Tanjung pandan	Hasil :	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	7 Dok	178.463.000,00	Kegiatan :	Penataan Organisasi	Tanjung pandan	Hasil :	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	7 Dok	178.463.000,00
	Sub Kegiatan :	1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Tanjung pandan	Keluaran :	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dok	36.620.000,00	Sub Kegiatan :	1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Tanjung pandan	Keluaran :	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dok	36.620.000,00
		2. Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tanjung pandan	Keluaran :	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Lap	35.850.000,00		2. Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tanjung pandan	Keluaran :	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Lap	35.850.000,00
		3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tanjung pandan	Keluaran :	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dok	40.050.000,00		3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tanjung pandan	Keluaran :	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dok	40.050.000,00
		4. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tanjung pandan	Keluaran :	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dok	26.310.000,00		4. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tanjung pandan	Keluaran :	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dok	26.310.000,00

No	Rancangan Awal RKPD						Rancangan Awal RKPD							
	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
2		5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tanjung pandan	Keluaran :	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dok	39.633.000,00		5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tanjung pandan	Keluaran :	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dok	39.633.000,00
	Kegiatan :	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tanjung pandan	Hasil :	Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5 Lap	982.691.000,00	Kegiatan :	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tanjung pandan	Hasil :	Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5 Lap	982.691.000,00
	Sub Kegiatan :	1. Fasilitasi Keprotokolan	Tanjung pandan	Keluaran :	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Lap	314.697.000,00	Sub Kegiatan :	1. Fasilitasi Keprotokolan	Tanjung pandan	Keluaran :	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Lap	314.697.000,00
		2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Tanjung pandan	Keluaran :	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2 Lap	315.539.000,00		2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Tanjung pandan	Keluaran :	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2 Lap	315.539.000,00
		3. Pendokumen tasi Tugas Pimpinan	Tanjung pandan	Keluaran :	Jumlah Laporan Pendokumentasia n Tugas Pimpinan	2 Lap	352.455.000,00		3. Pendokumen tasi Tugas Pimpinan	Tanjung pandan	Keluaran :	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2 Lap	352.455.000,00
	2 Program :	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Tanjung pandan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		100%	9.450.300,00	2 Program :	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Tanjung pandan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		100%	9.450.300,00
	Kegiatan :	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Tanjung pandan	Hasil :	Dokumen Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1 BA	9.450.300,00	Kegiatan :	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Tanjung pandan	Hasil :	Dokumen Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1 BA	9.450.300,00
	Sub Kegiatan :	1. Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tanjung pandan	Keluaran :	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 BA	9.450.300,00	Sub Kegiatan :	1. Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tanjung pandan	Keluaran :	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 BA	9.450.300,00

No	Rancangan Awal RKPD						Rancangan Awal RKPD					
	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
3	3 Program :	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tanjung pandan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bagian Pemerintahan yang Ditindaklanjuti	100%	473.013.900,00	3 Program :	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tanjung pandan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bagian Pemerintahan yang Ditindaklanjuti	100%	473.013.900,00
				Persentase Rekomendasi Kebijakan Bagian Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti	100%	7.610.041.561,70				Persentase Rekomendasi Kebijakan Bagian Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti	100%	7.610.041.561,70
				Persentase Rekomendasi Kebijakan Bagian Hukum yang Ditetapkan	100%	244.558.800,00				Persentase Rekomendasi Kebijakan Bagian Hukum yang Ditetapkan	100%	244.558.800,00
	Kegiatan :	Administrasi Tata Pemerintahan	Tanjung pandan	Hasil : Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	6 Dok	456.362.300,00	Kegiatan :	Administrasi Tata Pemerintahan	Tanjung pandan	Hasil : Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	6 Dok	456.362.300,00
	Sub Kegiatan :	1. Penataan Administrasi Pemerintahan	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dok	355.936.300,00	Sub Kegiatan :	1. Penataan Administrasi Pemerintahan	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dok	355.936.300,00
		2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dok	11.820.300,00		2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dok	11.820.300,00
		3. Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dok	88.605.700,00		3. Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dok	88.605.700,00
	Kegiatan :	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Tanjung pandan	Hasil : Dokumen Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	5 Dok	7.610.041.561,70	Kegiatan :	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Tanjung pandan	Hasil : Dokumen Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	5 Dok	7.610.041.561,70
	Sub Kegiatan :	1. Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2 Dok	2.277.636.561,70	Sub Kegiatan :	1. Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2 Dok	2.277.636.561,70

No	Rancangan Awal RKPD						Rancangan Awal RKPD					
	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dok	3.913.595.000,00		2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dok	3.913.595.000,00	
	3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dok	1.418.810.000,00		3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Tanjung pandan	Keluaran : Laporan Pemberian Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dok	1.418.810.000,00	
	Kegiatan : Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Tanjung pandan	Hasil : Produk Hukum Daerah yang Terharmonisasi	707 Dok	244.558.800,00		Kegiatan : Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Tanjung pandan	Hasil : Produk Hukum Daerah yang Terharmonisasi	707 Dok	244.558.800,00	
	Sub Kegiatan : 1. Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	700 Dok	60.656.100,00		Sub Kegiatan : 1. Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	700 Dok	60.656.100,00	

No	Rancangan Awal RKPD						Rancangan Awal RKPD					
	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
3		2. Fasilitas Bantuan Hukum	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	5 Kasus	138.428.900,00		2. Fasilitas Bantuan Hukum	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	5 Kasus	138.428.900,00
		3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	5 Dok	45.473.800,00		3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	4 Dok	45.473.800,00
	Kegiatan :	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tanjung pandan	Hasil : Dokumen Kerja Sama Daerah	1 Dok	16.651.600,00	Kegiatan :	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tanjung pandan	Hasil : Dokumen Kerja Sama Daerah	1 Dok	16.651.600,00
	Sub Kegiatan :	1. Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dok	16.651.600,00	Sub Kegiatan :	1. Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dok	16.651.600,00
	3 Program :	Program Perekonomian dan Pembangunan	Tanjung pandan	Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bagian Perekonomian dan SDA yang Ditindaklanjuti	85%	55.276.500,00	3 Program :	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tanjung pandan	Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bagian Perekonomian dan SDA yang Ditindaklanjuti	85%	55.276.500,00
				Persentase Kebijakan Program Pembangunan Daerah yang Dievaluasi	100%	83.253.800,00				Persentase Kebijakan Program Pembangunan Daerah yang Dievaluasi	100%	83.253.800,00
				Indeks Tata Kelola PBJ	80	228.635.200,00				Indeks Tata Kelola PBJ	100%	228.635.200,00
	Kegiatan :	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Tanjung pandan	Hasil : Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	11 Dok	33.868.300,00	Kegiatan :	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Tanjung pandan	Hasil : Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	11 Dok	33.868.300,00
	Sub Kegiatan :	1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dok	11.937.400,00	Sub Kegiatan :	1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dok	11.937.400,00

No	Rancangan Awal RKPD						Rancangan Awal RKPD					
	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomi	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	7 Lap	18.105.500,00		2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomi	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	7 Lap	18.105.500,00
		3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dok	3.825.400,00		3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dok	3.825.400,00
	Kegiatan :	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Tanjung pandan	Hasil : Dokumen Administrasi Pembangunan	14 Dok	83.253.800,00	Kegiatan :	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Tanjung pandan	Hasil : Dokumen Administrasi Pembangunan	14 Dok	83.253.800,00
	Sub Kegiatan :	1. Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dok	6.026.400,00	Sub Kegiatan :	1. Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dok	6.026.400,00
		2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Dok	25.053.400,00		2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Dok	25.053.400,00
		3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Dok	52.174.000,00		3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Dok	52.174.000,00
	Kegiatan :	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tanjung pandan	Hasil : Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dok	228.635.200,00	Kegiatan :	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tanjung pandan	Hasil : Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dok	228.635.200,00
	Sub Kegiatan :	1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dok	27.370.900,00	Sub Kegiatan :	1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dok	27.370.900,00

No	Rancangan Awal RKPD						Rancangan Awal RKPD					
	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dok	134.369.900,00		2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dok	134.369.900,00
		3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Org	66.894.400,00		3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Org	66.894.400,00
	Kegiatan : Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Tanjung pandan	Hasil : Dokumen Hasil Kebijakan Sumber Daya Alam	5 Dok	21.408.200,00	Kegiatan : Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Tanjung pandan	Hasil : Dokumen Hasil Kebijakan Sumber Daya Alam	5 Dok	21.408.200,00	
	Sub Kegiatan :	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dok	10.037.400,00	Sub Kegiatan :	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dok	10.037.400,00
		2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanian	4 Dok	11.370.800,00		2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanian	4 Dok	11.370.800,00

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Penetapan kebijakan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung selain mengacu pada kebijakan Pemerintah Provinsi, juga merujuk pada kebijakan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Untuk itu, Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung harus merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun berikutnya berdasarkan telaahan terhadap prioritas nasional dalam rancangan awal RKPD 2026.

Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026 dilaksanakan melalui Pendekatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) secara holistic, tematik dan terintegrasi secara spesial.

Diharapkan Pemerintah Daerah dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai sasaran-sasaran prioritas nasional di masing-masing daerah. Susun prioritas pembangunan di daerah sesuai dengan isu serta permasalahan yang dianggap prioritas. Pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan alokasi Dana Perimbangan didalam membangun daerah, perlu juga untuk mencermati pelaksanaan prioritas nasional di daerah agar sinergi dengan program-program prioritas dari K/L untuk mendukung prioritas nasional tersebut. Pentingnya sinergi antara semua tingkat pemerintahan. Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026 yang harus dilaksanakan di semua tingkat pemerintahan. Visi, Misi dan Sasaran dalam RPJM Nasional 2020-2024 adalah tujuan bernegara dalam jangka menengah 5 tahun yang harus dicapai oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan tingkat kewenangannya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2026 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029, yaitu:

Tujuan

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Sasaran

1. Implementasi kebijakan Bidang Administrasi Umum yang efektif
2. Implementasi kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra yang efektif
3. Implementasi kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang efektif

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Sekretariat Daerah
Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Indikator
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		Status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	2,75 (sedang)
		Implementasi kebijakan Bidang Administrasi Umum yang efektif	Persentase kebijakan bidang administrasi umum yang efektif	75%
		Implementasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang efektif	Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang efektif	75%
		Implementasi kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang efektif	Persentase kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang efektif	75%

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Pada tahun 2026 dengan berpedoman pada Kepmendagri Nomor 900.1.2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Sekretariat Daerah akan melaksanakan 4 Program, 19 Kegiatan, dan 62 sub kegiatan.

Sub Kegiatan. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta indikator program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan,

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Sub kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

Program ini terdiri 10 kegiatan dan 39 sub kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 7) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau lapangan
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
 - 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
8. Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
9. Kegiatan Penataan Organisasi, meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik Dan Tata Laksana
 - 3) Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi
 - 4) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik

- 5) Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
- 10. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan
 - 3) Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan

3. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program ini terdiri dari 4 kegiatan dan 11 sub kegiatan, yaitu :

- 1. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan
 - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
 - 3) Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah
- 2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
 - 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
- 3. Fasilitas dan koordinasi Hukum, meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum
 - 3) Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
- 4. Fasilitas Kerja Sama Daerah, meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri
 - 2) Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

4. Program Perekonomian Dan Pembangunan, Program ini terdiri dari 4 kegiatan dan 11 sub kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Dan BLUD
 - 2) Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
 - 3) Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan ekonomi Mikro Kecil
2. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
 - 2) Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
 - 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
3. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - 3) Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan barang dan Jasa
4. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, dengan anggaran sebesar Rp. 9.450.300,00 terdiri dari :

- a. Kegiatan penyelesaian sengketa tanah Garapan dengan anggaran Rp.9.450.300,00;

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar **Rp. 32.129.546.795,55,-** terdiri dari :

- a. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan anggaran Rp. 5.902.900,00;
- b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, dengan anggaran Rp. 21.292.866.241,55;
- c. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, dengan anggaran Rp. 105.000.000,00;
- d. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah, dengan anggaran Rp. 2.421.603.860,00;
- e. Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, dengan anggaran Rp. 3.325.865.000,00;
- f. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan anggaran Rp. 986.431.000,00;
- g. Kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan anggaran Rp. 1.750.773.794,00;
- h. Kegiatan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, dengan anggaran Rp. 1.079.950.000,00;
- i. Kegiatan penataan organisasi, dengan anggaran Rp. 178.463.000,00;
- j. Kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan, dengan anggaran Rp. 982.691.000,00;

3. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dengan anggaran sebesar **Rp. 8.327.614.261,70**, terdiri dari :

- a. Kegiatan administrasi tata pemerintahan, dengan anggaran Rp. 456.362.300,00;
- b. Kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, dengan anggaran Rp. 7.610.041.561,70;
- c. Kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum, dengan anggaran Rp. 244.558.800,00 ;
- d. Kegiatan fasilitasi kerja sama daerah, dengan anggaran Rp. 16.651.600,00 ;

4. Program Perekonomian dan Pembangunan, dengan anggaran sebesar **Rp. 367.165.500,00** Terdiri dari :

- a. Kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian, dengan anggaran Rp. 33.868.300,00;
- b. Kegiatan pemantauan kebijakan sumber daya alam, dengan anggaran Rp. 21.408.200,00 ;
- c. Kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan, dengan anggaran Rp. 83.253.800,00;
- d. Kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dengan anggaran Rp. 228.635.200,00.

Secara rinci rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2026 dan prakiraan maju Tahun 2027 dapat dilihat pada **Tabel. 4.1** :

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan kegiatan administrasi Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.

Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung dapat berperan dalam merumuskan kebijakan publik sehingga diharapkan akan dapat mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, juga diharapkan mampu mengimplementasikan profesionalismenya dengan berpikir rasional, memiliki komitmen dan etika, baik sebagai fasilitator maupun advisor perumusan kebijakan publik. Sebagai fasilitator Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung diharapkan dapat memfasilitasi pelaksanaan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dinas, Lembaga Teknis Daerah dapat berjalan selaras, serasi dan seimbang dalam suatu mekanisme kerja yang sistematis dan terpadu.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung akan dapat dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan Pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta menjunjung nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat dan bangsa secara pribadi.

Demikian semoga Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.

Tanjungpandan, Agustus 2025

Py. Sekretaris Daerah,

Marzuki

LAMPIRAN

MATRIK RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2026

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BELITUNG
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BELITUNG						178.463.000,00							252.250.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						178.463.000,00							252.250.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						178.463.000,00							252.250.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %			100 %	178.463.000,00						100 %	252.250.000,00	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Dokumen Penataan Organisasi	21 Dokumen			7 Dokumen	178.463.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Dokumen	252.250.000,00	BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dokumen			2 Dokumen	36.620.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Dokumen	63.083.000,00	BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6 Laporan			2 Laporan	35.850.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Laporan	48.252.000,00	BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BELITUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	40.050.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Dokumen	61.360.000,00	BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	26.310.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Dokumen	31.600.000,00	BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	39.633.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Dokumen	47.955.000,00	BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BELITUNG
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KAB. BELITUNG						1.082.731.400,00							2.011.550.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						1.082.731.400,00							2.011.550.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						1.082.731.400,00							2.011.550.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	1.082.731.400,00						100 %	2.011.550.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %			100 %	100.040.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur dan Masyarakat	0 %	110.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen			1 Dokumen	100.040.400,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur dan Masyarakat	0 Dokumen	110.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	36 Laporan			12 Laporan	982.691.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Laporan	1.901.550.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan			4 Laporan	314.697.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Laporan	619.700.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KAB. BELITUNG	
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan															
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan			4 Laporan	315.539.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Laporan	597.650.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KAB. BELITUNG	
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan															
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan			4 Laporan	352.455.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Laporan	684.200.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KAB. BELITUNG	
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. BELITUNG							228.635.200,00							556.650.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						228.635.200,00							556.650.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						228.635.200,00							556.650.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Pengelolaan Pengadaan barang/Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa yang Ditindaklanjuti	100 %			100 %	228.635.200,00						100 %	556.650.000,00	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	9 Dokumen			3 Dokumen	228.635.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur dan Masyarakat	0 Dokumen	556.650.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen			1 Dokumen	27.370.900,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur dan Masyarakat	0 Dokumen	164.800.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	3 Dokumen			1 Dokumen	134.369.900,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur dan Masyarakat	0 Dokumen	287.950.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	900 Orang			300 Orang	66.894.400,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur dan Masyarakat	0 Orang	103.900.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. BELITUNG
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KAB. BELITUNG						7.610.041.561,70							11.865.800.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						7.610.041.561,70							11.865.800.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						7.610.041.561,70							11.865.800.000,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100 %			100 %	7.610.041.561,70						100 %	11.865.800.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Dokumen Kebijakan Kesejahteraan rakyat	15 Dokumen			5 Dokumen	7.610.041.561,70			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur dan Masyarakat	0 Dokumen	11.865.800.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6 Dokumen			2 Dokumen	2.277.636.561,70	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur dan Masyarakat	0 Dokumen	4.473.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	6 Dokumen			2 Dokumen	3.913.595.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur dan Masyarakat	0 Dokumen	5.536.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3 Dokumen			1 Dokumen	1.418.810.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur dan Masyarakat	0 Dokumen	1.856.800.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KAB. BELITUNG
		BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG						30.962.489.895,55							39.265.200.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						30.962.489.895,55							39.265.200.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						30.962.489.895,55							39.265.200.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %			100 %	30.962.489.895,55						100 %	39.265.200.000,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	6 Dokumen			2 Dokumen	21.292.866.241,55			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Dokumen	23.027.500.000,00	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	371 Orang/bulan			113 Orang/bulan	21.291.605.841,55	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Orang/bulan	23.000.000.000,00	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan			3 Laporan	1.260.400,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Laporan	27.500.000,00	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60 Orang			20 Orang	105.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Orang	254.000.000,00	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	60 Orang			20 Orang	105.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Orang	254.000.000,00	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	2.421.603.860,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 %	4.020.000.000,00	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket			1 Paket	100.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Paket	170.000.000,00	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket			2 Paket	203.630.456,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Paket	220.000.000,00	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	43.025.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Paket	220.000.000,00	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket			2 Paket	1.031.754.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Paket	1.650.000.000,00	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	30.656.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Paket	60.000.000,00	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan			12 Laporan	1.012.538.404,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Laporan	1.700.000.000,00	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %			100 %	3.325.865.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 %	3.822.000.000,00	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	36 Laporan			4 Laporan	8.600.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Memperkua t sistem pe merintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintah an yang Inovatif	Aparatur	0 Laporan	22.000.000,00	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	36 Laporan			4 Laporan	1.509.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Memperkua t sistem pe merintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintah an yang Inovatif	Aparatur	0 Laporan	1.750.000.000,00	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	20.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkua t sistem pe merintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintah an yang Inovatif	Aparatur		50.000.000,00	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	36 Laporan			4 Laporan	1.788.265.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Laporan	2.000.000.000,00	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik</i>	18 Jenis			6 Jenis	986.431.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Jenis	3.895.700.000,00	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	4 Unit			1 Unit	49.670.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Unit	60.100.000,00	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	132 Unit			68 Unit	436.761.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Unit	859.600.000,00	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	600 Unit			50 Unit	250.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Unit	726.000.000,00	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit			17 Unit	250.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Unit	2.250.000.000,00	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %			100 %	1.750.773.794,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur dan Masyarakat	0 %	2.043.000.000,00	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan			2 Orang/Bulan	928.413.794,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur dan Masyarakat	0 Orang/Bulan	1.123.000.000,00	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	145.360.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur dan Masyarakat	0 Paket	155.000.000,00	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	20 Orang			6 Orang	77.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur dan Masyarakat	0 Orang	165.000.000,00	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	51 Orang/Bulan			17 Orang/Bulan	600.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur dan Masyarakat	0 Orang/Bulan	600.000.000,00	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	<i>Kebutuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</i>	38 Paket			14 Paket	1.079.950.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Paket	2.203.000.000,00	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	15 Paket			6 Paket	530.525.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Paket	1.031.000.000,00	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG	
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah															
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	11 Paket			6 Paket	529.425.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Paket	1.052.000.000,00	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG	
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah															
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket			2 Paket	20.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Paket	120.000.000,00	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG	
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KAB. BELITUNG							55.276.500,00							309.605.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						55.276.500,00							309.605.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						55.276.500,00							309.605.000,00		
1.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang Ditindaklanjuti	100 %			100 %	55.276.500,00						100 %	309.605.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	33 Dokumen			11 Dokumen	33.868.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur dan Masyarakat	0 Dokumen	281.105.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6 Dokumen			2 Dokumen	11.937.400,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur dan Masyarakat	0 Dokumen	248.805.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	21 Laporan			7 Laporan	18.105.500,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur dan Masyarakat	0 Laporan	25.800.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil</i>	6 Dokumen			2 Dokumen	3.825.400,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur dan Masyarakat	0 Dokumen	6.500.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	<i>Dokumen Hasil Kebijakan Sumber Daya Alam</i>	15 Dokumen			5 Dokumen	21.408.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur dan Masyarakat	0 Dokumen	28.500.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	10.037.400,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur dan Masyarakat	0 Dokumen	13.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan</i>	12 Dokumen			4 Dokumen	11.370.800,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur dan Masyarakat	0 Dokumen	15.500.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KAB. BELITUNG
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. BELITUNG						89.156.700,00							327.300.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						89.156.700,00							327.300.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						89.156.700,00							327.300.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan</i>	100 %			100 %	5.902.900,00						100 %	41.000.000,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	32 Dokumen			12 Dokumen	5.902.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Dokumen	41.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	8 Dokumen			2 Dokumen	2.087.600,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Dokumen	10.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	250.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Dokumen	5.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	250.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Dokumen	4.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	1.223.400,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Dokumen	5.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	763.400,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Dokumen	4.500.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan			3 Laporan	1.328.500,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Laporan	12.500.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. BELITUNG
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Penyusunan, Pengendalian Program Pembangunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan yang Ditindaklanjuti	100 %			100 %	83.253.800,00						100 %	286.300.000,00	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Dokumen Administrasi Pembangunan	42 Dokumen			14 Dokumen	83.253.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Dokumen	286.300.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	6.026.400,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Dokumen	164.800.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan</i>	3 Laporan			1 Laporan	25.053.400,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Laporan	50.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</i>	36 Laporan			12 Laporan	52.174.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Laporan	71.500.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. BELITUNG
		BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BELITUNG						244.558.800,00							461.299.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						244.558.800,00							461.299.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						244.558.800,00							461.299.000,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Perundang- undangan, Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Informasi yang Ditindaklanjuti</i>	100 %			100 %	244.558.800,00						100 %	461.299.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	<i>Produk Hukum Daerah Yang Terharmonisasi</i>	2130 Dokum en			712 Dokumen	244.558.800,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Memperkua t sistem pe merintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintah an yang Inovatif	Aparatur dan Masyarakat	0 Dokumen	461.299.000,00	BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			<i>Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun</i>	2100 Dokumen			700 Dokumen	60.656.100,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Memperkua t sistem pe merintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintah an yang Inovatif	Aparatur dan Masyarakat	0 Dokumen	89.730.000,00	BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			<i>Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum</i>	19 Kasus			7 Kasus	138.428.900,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Memperkua t sistem pe merintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintah an yang Inovatif	Aparatur dan Masyarakat	0 Kasus	323.269.000,00	BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi</i>	15 Dokumen			1 Dokumen	45.473.800,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur dan Masyarakat	0 Dokumen	48.300.000,00	BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BELITUNG
		BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BELITUNG						482.464.200,00							806.602.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.450.300,00							28.220.000,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						9.450.300,00							28.220.000,00	
1.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	<i>Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</i>	100 %			100 %	9.450.300,00						100 %	28.220.000,00	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Dokumen Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</i>	9 Berita Acara			3 Berita Acara	9.450.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur dan Masyarakat	0 Berita Acara	28.220.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BELITUNG
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Berita Acara	9.450.300,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur dan Masyarakat		28.220.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BELITUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						473.013.900,00							778.382.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						473.013.900,00							778.382.000,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah yang Ditindaklanjuti	100 %			100 %	473.013.900,00						100 %	778.382.000,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	20 Dokumen			7 Dokumen	456.362.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur dan Masyarakat	0 Dokumen	758.232.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen			1 Dokumen	355.936.300,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur dan Masyarakat	0 Dokumen	582.532.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen			1 Dokumen	11.820.300,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur dan Masyarakat	0 Dokumen	43.400.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</i>	14 Dokumen			5 Dokumen	88.605.700,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur dan Masyarakat	0 Dokumen	132.300.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	<i>Dokumen Kerja Sama Daerah</i>	6 Dokumen			2 Dokumen	16.651.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Dokumen	20.150.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BELITUNG
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	16.651.600,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Aparatur	0 Dokumen	20.150.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BELITUNG
	JUMLAH							40.933.817.257,25							55.856.256.000,00	